

ABSTRACT

This study discusses the use of aircraft registration codes and nationality marks as regulated in Annex 7 ICAO. This study aims to explain the legal consequences that arise if there is a violation of the rules that have been set. It is mandatory for all civil aircraft to be officially registered and have nationality marks and registrations in accordance with ICAO standards. The identification system that has been set by ICAO plays a very important role in preventing registration, illegal operations, and violations of airspace sovereignty and making it easier to track and identify aircraft in the event of an accident or act of terrorism. By using normative legal methods (doctrinal) and a statutory and case approach, this study analyzes both primary and secondary legal sources as well as ICAO standards, international and national aviation law, and related international agreements. The main case study is a violation of a foreign aircraft serving a domestic route without valid registration, this violation occurred in Indonesia where this action has violated Annex 7 ICAO and violated the laws of the country where the violation occurred. Compliance with the standards that have been set needs to be emphasized in order to ensure safety, security, and accountability in flight. With this research, it is expected to provide both theoretical and practical contributions in understanding and implementing ICAO regulations on aircraft registration codes and nationality for safe and orderly international flights.

Keywords: *Aircraft Nationality & Registration Marks, Annex 7 ICAO, Chicago Convention 1944, Violation of Air Sovereignty, Aviation Law*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penggunaan kode registrasi pesawat udara dan tanda kebangsaan sebagaimana diatur dalam Annex 7 ICAO. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Setiap pesawat udara sipil wajib terdaftar secara resmi dan memiliki tanda kebangsaan serta registrasi sesuai dengan standar ICAO. Sistem identifikasi yang telah ditetapkan oleh ICAO memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya registrasi, operasi ilegal, dan pelanggaran kedaulatan wilayah udara serta memudahkan pelacakan dan identifikasi pesawat udara apabila terjadi kecelakaan atau aksi terorisme. Dengan menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) dan pendekatan perundang-undangan serta kasus, penelitian ini menganalisis sumber hukum baik primer maupun sekunder serta standar ICAO, hukum penerbangan internasional dan nasional, serta perjanjian internasional terkait. Studi kasus utama adalah pelanggaran terhadap pesawat udara asing yang melayani rute domestik tanpa registrasi yang sah, pelanggaran ini terjadi di Indonesia dimana tindakan ini telah melanggar Annex 7 ICAO dan melanggar hukum negara tempat terjadinya pelanggaran. Kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan perlu ditegaskan guna menjamin keselamatan, keamanan, dan akuntabilitas dalam penerbangan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan ICAO tentang kode registrasi pesawat udara dan kebangsaan untuk penerbangan internasional yang aman dan tertib.

Kata Kunci: *Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran Pesawat, Annex 7 ICAO, Konvensi Chicago 1944, Pelanggaran Kedaulatan Udara, Hukum Penerbangan*